

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Perwujudan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan keuangan badan perencanaan pembangunan daerah belum cukup optimal, adanya keterbukaan informasi untuk diakses oleh masyarakat luas namun kemudahan untuk memperoleh informasi masih sangat sulit dan masyarakat perlu mendatangi kantor Bappeda jika ingin memperoleh informasi tersebut.
- b. Perwujudan nilai-nilai akuntabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses penganggaran telah dilakukan sesuai dengan prosedur pemerintah daerah dengan selalu memperhatikan masukan dari masyarakat dalam perumusan anggaran, perencanaan program, pelaksanaan maupun pada tingkat pengawasan dan mempertanggung jawabkan semua program kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Penerapan konsep *value for money* dalam peningkatan kinerja Bappeda dilihat dari program-program kerja masih belum nampak jelas karena kekurangan informasi selanjutnya penetapan indikator ekonomis, efisiensi dan efektivitas tidak dinampakan pada pengukuran kinerja keuangan Bappeda.

5.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis penelitian ini berkaitan dengan teori nilai transparansi, nilai akuntabilitas dan konsep *value for money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumba Barat. Implikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- d. Implikasi yang berkenaan dengan teori nilai transparansi. Penelitian ini belum mampu mengelaborasi terkait dengan perwujudan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sektor publik di Bappeda Sumba Barat masih tergolong rendah dan belum mampu menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai transparansi. Karena itu diharapkan Bappeda Kabupaten Sumba Barat perlu menunjukkan kerja nyata secara terbuka dan bebas aktif dengan menyajikan informasi mengenai perencanaan pembangunan dan tata kelola keuangan sektor publik kepada masyarakat dan umum. Bappeda perlu menjamin keabsahan informasi tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Hasil penelitian (Sayuti, dkk. 2018) dapat membuktikan bahwa dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Dalam mendukung terwujudnya *good governance* masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip *good governance*. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka. Serta adanya sosialisasi pengetahuan

teknologi atau *e-government* kepada masyarakat umum yang masih belum paham dengan IT.

- e. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah belum berdaya guna dan penerapan nilai-nilai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik di Bappeda Sumba Barat tergolong rendah. Penerapan nilai akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan dan pencapaian kinerja Bappeda kepada masyarakat. Namun dalam penelitian ini standar prosedur pencapaian kinerja belum menunjukkan adanya hasil nyata. Hasil penelitian (Sayuti, dkk. 2018) menggunakan *Theory agency* untuk menghubungkan tanggungjawaban sektor publik dimana masyarakat berperan sebagai pemberi amanah sekaligus pemilik dan pelanggan (*customer*) dan tugas pemerintah daerah dengan peran dan fungsi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (*civil service*). Dalam penerapan nilai akuntabilitas dapat menggunakan teori agensi yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat sebagai pengawas sekaligus sebagai pemberi amanah sedangkan pemerintah berfungsi sebagai pelayan kepada masyarakat dan dibayar oleh negara untuk melakukan kegiatan demi kesejahteraan masyarakat.
- f. Konsep *value for money* dalam pengelolaan keuangan sektor publik di Bappeda Kabupaten Sumba Barat. Kinerja pengelolaan keuangan dengan menggunakan konsep *Value for money* dalam menggambarkan keberhasilan suatu program karena dalam konsep ini menganalisis adanya penggunaan anggaran secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Terpenuhinya ketiga

konsep ini maka pengelolaan keuangan sektor publik dikatakan berhasil. Namun dalam penelitian belum menunjukkan adanya hal seperti itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak menerapkan ketiga konsep tersebut sehingga pengelolaan anggaran program tidak menunjukkan secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas memenuhi syarat atau tidak. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian (Sayuti, dkk. 2018). Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money* yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja mampu menekan biaya dan mendapatkan hasil yang berkualitas dalam proses penganggaran secara ekonomi, efisien, efektifitas. Kegiatan yang dilaksanakan dan kemahiran pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya meningkatkan kinerjanya. Hasil yang diperoleh dari kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara nyata langsung dirasakan manfaatnya dari program kerjanya. Sebagai organisasi publik yang segala kegiatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak berorientasi pada laba melainkan memanfaatkan dana sebaik mungkin.

5.3 Implikasi Terapan

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 1) perwujudan transparansi dalam pengelolaan keuangan masih sangat di perlukan bukan saja masyarakat harus datang ke kantor Bappeda namun informasi tersebut dapat diakses di internet dan media papan pengumuman dan bisa diakses langsung oleh masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan harus menyeluruh bagi masyarakat baik dalam pengelolaan sumber daya, pelaporan serta menyajikan semua aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan anggaran sektor publik, 3) perlu perbaikan dalam penerapan konsep *value for money* guna menunjukkan indikator pengukuran kinerja keuangan daerah dengan merujuk pada ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran dan diharapkan staff/pegawai dapat meningkatkan lagi kinerjanya secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas.